



# **LAPORAN PENGADUAN BPVP KENDARI 2026**



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS  
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

Jl. D.I Panjaitan No. 226 Kendari, Telp. (0401) 3193364 Fax. (0401) 3190427  
email : [bpvpkendari@kemnaker.go.id](mailto:bpvpkendari@kemnaker.go.id) Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

SURAT TUGAS

Nomor : 2.13/36/KP.11.00 //2026

Menimbang : dalam rangka memberikan layanan prima kepada masyarakat untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi layanan informasi dan pengaduan, perlu dibuatkan Surat Perintah Penugasan;

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik di Kementerian Ketenagakerjaan;  
3. Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013 tentang sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR).

Menugaskan :

Kepada : Nama : Sukriani, S.H  
NIP : 199301132023212039  
Pangkat/Golongan : Golongan IX  
Jabatan : 1. Melaksanakan tugas sebagai Kepala Pengelola sekaligus menerima pengaduan yang terhubung dengan SP4N-LAPOR di  
Untuk : pada tanggal 05 Januari s.d 31

Lingkup BPVP Kendari

Desember 2026;

2. Melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
3. Membuat laporan tertulis berkala kepada atasan langsung;
4. Pegawai BPVP Kendari tidak menerima gratifikasi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kendari, 05 Januari 2026

Kepala,



Amran, ST  
NIP 19830312200901 1 014



## REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT TRIWULAN I

Pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).

Berikut pengaduan layanan yang masuk di BPVP Kendari sampai tanggal 30 Maret 2026

No.	Pengaduan Masyarakat	Jumlah
1.	Pengaduan masyarakat yang harus ditindak lanjuti	0
2.	Pengaduan masyarakat yang sedang ditindak lanjuti	0
3.	Pengaduan masyarakat yang selesai ditindak lanjuti	0